

bagaimana strategi dan cara seorang Bambang Dwi Hartono untuk dapat meneruskan tongkat estafet pemerintahan Alm. Sunarto Sumoprawiro dengan menjalankan sistem dan program yang ada, mencoba beradaptasi dengan pemikiran politik Alm Sunarto Sumoprawiro, sampai membangun citra diri dengan komunikasi politik secara kelembagaan. Sementara penataan yang bersifat eksternal dilakukan dengan langkah mencari dukungan dan kepercayaan dari Parpol yang berada di konstituen, sampai mencari dukungan politik dan jaminan kekuasaan pemerintahan dari semua unsur elemen pengusung mantan walikota Alm. Sunarto Sumoprawiro.

Setelah menjadi walikota di masa transisi selama tiga tahun, Bambang Dwi Hartono seakan membaca peta politik lokal Surabaya. Tahun 2005 Bambang Dwi Hartono mencalonkan dirinya dalam pemilihan walikota/wakil walikota Surabaya periode 2005-2010 berpasangan dengan Arif Afandi. Sebuah prestasi tersendiri bagi seorang Bambang Dwi Hartono karena mampu menjadi walikota untuk kedua kalinya. Di samping kesuksesan memenangkan pemilihan walikota Surabaya periode 2005-2010, Bambang Dwi Hartono dituntut untuk mampu melakukan konsolidasi sistem kelembagaan baik bersifat internal (pemerintahan) maupun eksternal (kekuatan politik lokal Surabaya).

Hal ini dilakukan agar terjalin stabilisasi pemerintahan di tingkat kota. Selain itu, bagaimana seorang Bambang Dwi Hartono dituntut untuk mampu menelurkan produk kebijakan yang populis bagi kota Surabaya terlebih masyarakat kota Surabaya sendiri. Karena di dalam sebuah pemerintahan, seorang komunikator politik dalam hal ini adalah Walikota mempunyai keharusan untuk melakukan sebuah proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi

- a. Sebagai syarat dalam menempuh program strata 1 (satu) pada program studi Ilmu Komunikasi fakultas dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Sebagai wahana pengembangan akademis dan dalam upaya memahami praktek-praktek komunikasi yang dilakukan oleh aktor komunikator politik dalam hal ini pejabat pemerintahan kota. Sehingga dalam materi komunikasi tidak hanya diketahui dari sisi teorinya saja, tetapi pemahaman dalam praktek ilmu komunikasi dapat memberikan nilai lebih bagi program studi Ilmu Komunikasi.

Maksud kajian hasil penelitian terdahulu adalah memuat tentang hasil penelitian yang pernah ada. Sepanjang melakukan upaya penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang coba diambil titik singgung persamaan dengan penelitian yang berjudul “Komunikasi Politik Walikota Bambang Dwi Hartono”, peneliti menemukan kajian hasil penelitian terdahulu seperti contoh di bawah ini:

					menganggap forum ini sebagai ancaman pemerintahan		
--	--	--	--	--	---	--	--

dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan rakyat. Politik merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga sebagai seni².

Komunikasi politik menurut Dahlan (1989) ialah suatu bidang atau disiplin ilmu yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik³.

Seorang pemimpin (komunikator politik) dituntut untuk dapat menjalankan peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila mampu menjalankan proses komunikasi politik dengan baik, karena pemimpin (komunikator politik) dalam menjalankan kepemimpinan berada dalam lokus suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Disadari atau tidak, pemimpin adalah pihak yang membuat sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang menciptakan pemimpin⁴. Hal ini pula yang terjadi dalam kepemimpinan seorang Bambang Dwi Hartono saat menjadi tokoh sentral dalam pemerintahan kota Surabaya.

² Inu Kencana Syafie & Azhari, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 6.

³ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 35.

⁴ Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT. Indeks, 2010), hlm. 74.

Seorang Bambang D. H. mampu melakukan komunikasi serta interaksi yang lebih aktif dan positif yang bersifat multidimensional guna memajukan kota Surabaya dengan tidak menanggalkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat arus bawah (*grassroot*). Sehingga dapat memunculkan prinsip *egaliter* dalam kepemimpinan beliau saat memimpin kota Surabaya.

2. Walikota

Kota Surabaya pertama kali menggunakan istilah walikota sebagai pemimpin pemerintahan sejak tahun 1945. Sebelumnya, pemimpin kota Surabaya disebut Burgermeester kemudian berganti Shi Tyo hingga disebut sebagai Kepala Urusan Haminte sebelum berganti nama menjadi walikota. Sebutan walikota Surabaya pertama resmi digunakan pada bulan desember 1945, dengan dijabat oleh Mr. Indrakoesoema⁵. Setelah fase tahun 1945 hingga memasuki masa orde baru menjelang orde reformasi, Surabaya telah mengalami pergantian kepala pemerintahan kota/walikota sebanyak tiga belas kali. Terpilihnya Cak Narto (panggilan akrab Sunarto Sumprawiro) sebagai walikota Surabaya periode 1994-2000, menjadi masa terakhir pemilihan walikota di era orde baru karena di tahun 1998, Indonesia telah berganti masa menjadi orde reformasi.

Pemilihan walikota Surabaya pertama kali digelar pada era reformasi terjadi pada tahun 2000, dengan melahirkan pasangan Sunarto Sumoprawiro dengan Bambang Dwi Hartono sebagai walikota dan wakil walikota. Tetapi setelah dua tahun memimpin kota Surabaya, Sunarto Sumoprawiro meninggal dunia dan posisinya sebagai walikota digantikan oleh Bambang Dwi Hartono.

⁵ M. Anis Fathoni dkk, *Surabaya in The Book*, (Surabaya: Lembaga Publik Wongsongo, 2009), hlm. xiii.

Afiliasi politik seorang kepala daerah juga menjadi pedoman kepentingan karena Parpol sejatinya merupakan kendaraan politik yang digunakan seorang walikota/kepala daerah untuk maju dalam suksesi pemilihan. Dan unit analisis yang terakhir dari realitas politik adalah konsepsi pengelolaan birokrasi. Dalam tahapan ini, peneliti ingin lebih memfokuskan kepada bagaimana seorang

walikota/kepala daerah dalam mengelola sebuah kota Surabaya, terlebih dengan bentuk heterogenitas dari masyarakat kota Surabaya sendiri.

Setelah membahas mengenai realitas politik, maka akan terjadi proses komunikasi politik yang menghasilkan beberapa unit analisis, antara lain: reformasi birokrasi, supremasi hukum, pelayanan publik dan stabilitas politik lokal. Reformasi birokrasi digambarkan sebagai bentuk perubahan atau penataan yang dilakukan oleh Bambang saat menjabat sebagai walikota Surabaya, dengan alasan masih tingginya KKN di kalangan Pemkot Surabaya serta adanya sisa-sisa pemikiran rezim orde baru, seperti bentuk kooptasi seorang kepala daerah terhadap instansi-instansi pemerintahan. Sementara itu, di dalam menjalankan roda pemerintahan, supremasi hukum merupakan sebuah kebutuhan yang menjadi batasan dalam melaksanakan koordinasi pemerintahan kota. Menurut Weber, aturan haruslah rasional, yang berarti bahwa aturan dirancang untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Sektor pelayanan publik juga menjadi pokok pembahasan tersendiri, karena disadari atau tidak, tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu pemimpin pemerintahan dapat ditangkap dan dinilai oleh masyarakat luas. Sehingga pada sektor ini, seorang walikota dituntut untuk mampu melakukan pelayanan publik yang populis terhadap semua elemen masyarakat kota Surabaya. Dan yang terakhir adalah stabilitas politik lokal. Pada pembahasan ini, peneliti mencoba menggambarkan bagaimana sosok walikota dalam membangun dan menciptakan stabilitas politik lokal. Karena, dalam peta politik lokal Surabaya, berbagai elemen mempunyai kekuatan masing-masing yang jika pemimpin kota tidak mampu melakukan sebuah *balancing* maka yang terjadi adalah

sebuah gesekan konflik. Maka di sini dibutuhkan sosok dan peran walikota dalam membangun stabilitas politik lokal di Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik. Pendekatan ini memiliki tiga premis utama, yaitu: *pertama*, manusia bertindak terhadap sesuatu (benda, orang atau ide) atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu. *Kedua*, makna tentang sesuatu itu diperoleh, dibentuk, termasuk direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, pemaknaan terhadap sesuatu dalam bertindak atau berinteraksi tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses interpretasi⁶. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan dan pemaknaan manusia terhadap sesuatu kental bersifat situasional, yaitu bergantung pada definisi situasi yang dihadapi di tingkat interaksi itu sendiri. Jadi, pendekatan interaksionisme simbolik berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran⁷.

Pendekatan interaksi simbolik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memotret proses dan menggambarkan perspektif interaksi yang dilakukan Bambang Dwi Hartono sebagai individu, dalam melakukan interaksi dengan individu lain dan lingkungan sekitarnya. Sehingga yang terjadi adalah asumsi terhadap pengalaman Bambang Dwi Hartono yang ditengahi oleh penafsiran.

⁶ M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

⁷ Lexy K. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 17.

sebagai key informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder⁹. Data sekunder merupakan data yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi seperti literatur, majalah, artikel, dan internet maupun sumber kedua seperti Ormas dan KNPI kota Surabaya.

Sumber data adalah orang yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang mana peneliti ingin menentukan informan yang didasarkan pada kriteria pokok penelitian guna menggali data dan informasi berdasarkan tema penelitian. Penentuan jumlah informan tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas serta keragaman fenomena yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber data berasal dari sumber tertulis dan foto. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sementara sumber foto berasal dari foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

4. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap pra lapangan

Tahap ini merupakan tahapan penjajakan penelitian lapangan yang mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat usulan berbentuk proposal penelitian dan juga menentukan planning ke depan.

⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 128.

2) Memilih lapangan penelitian

Lapangan penelitian pada penelitian ini adalah kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

3) Mengurus perizinan

Peneliti mengumpulkan proposal penelitian kepada program studi Ilmu Komunikasi guna mendapat draf izin penelitian, setelah mendapat surat izin penelitian dari pihak Fakultas Dakwah, peneliti membawa ke kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk meminta izin dalam melakukan penelitian.

4) Menentukan informan

Pada tahap ini peneliti harus bisa menentukan kira-kira siapa saja yang dijadikan informan (orang-orang yang sekiranya berkompetensi untuk memberikan informasi dan faham tentang situasi dan kondisi latar penelitian).

5) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Hal ini penting ketika peneliti ingin melakukan wawancara, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Karena peneliti harus menyiapkan beberapa alat seperti bolpoin, book note, tape recorder, video dan kaset recorder serta kamera, untuk mencatat hasil wawancara dengan baik dan memudahkan peneliti dalam mengingat atau mereka ulang hasil wawancara yang didapat.

b. Tahap lapangan

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah bentuk persiapan diri yang dilakukan adalah kegiatan pengumpulan data dengan wawancara.

c. Penulisan laporan

Penulisan laporan dilakukan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tema penelitian yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Hal ini dilakukan peneliti untuk mencari data yang lebih valid berupa kliping, dokumen pemerintah kota, foto, buletin maupun data yang tersimpan di *server*, *website*, dan *flashdisk*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif selalu bersifat induktif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung secara bersamaan dengan cara reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Teknik analisis data dalam hal ini menggunakan teknik analisis domain (*Domain Analysis*). Teknik ini digunakan untuk menganalisis

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang relatif lama, jika kebutuhan data penelitian dirasa kurang, maka peneliti akan memperpanjang keterlibatannya dalam latar penelitian untuk melengkapi data dan kroscek data.

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentratif, dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang diteliti.

Diskusi dengan pakar dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui oleh peneliti mengenai proses penelitian komunikasi. Hal ini dilakukan mengingat kompetensi dan kapabilitas pakar dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya kajian mengenai komunikasi politik. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk meminta saran dan masukan guna memperbaiki penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Diskusi dengan pakar dilakukan

Pada bab ini berisi rangkuman dari keseluruhan fokus penelitian.